

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM
GERAKAN MENANAM SERENTAK (GERMAS) DI KABUPATEN ACEH
SINGKIL PROVINSI ACEH**

M. Reksy Noverdi

NPP. 32.0022

Asdaf Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: 32.0022@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Selvia Junita Praja, S.IP, M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Aceh Singkil Regency faces significant challenges related to high rates of land conversion, inflation fluctuations, and low community participation in fulfilling local food needs. These issues persist despite efforts to promote food self-sufficiency, including the implementation of the Simultaneous Planting Movement (GERMAS) program. **Purpose:** This study aims to describe and analyze the form of collaboration in the implementation of the GERMAS program, which is intended to increase farmers' income, enhance community welfare, and maintain the stability of local food supplies. **Method:** A descriptive qualitative approach was employed because it allows for an in-depth exploration of collaborative dynamics among stakeholders involved in the GERMAS program. Data were collected through direct observation, in-depth interviews, and documentation. Informants were selected purposively to include key actors directly involved in the program, such as officials from the Department of Food, Horticulture, and Livestock, village heads of GERMAS-implementing areas, farmer groups, and beneficiary community members. The key informant in this study was the Head of the Food Security Division, chosen for their strategic role in policy coordination and program implementation. The research was conducted in Aceh Singkil Regency from January to March 2024 over a period of approximately three months. Data were analyzed using NVivo software, guided by the Collaborative Governance theory by Ansell and Gash (2007), which comprises four key dimensions: initial conditions, facilitative leadership, institutional design, and collaboration processes. **Result:** The findings indicate that the GERMAS program in Aceh Singkil Regency has made a positive contribution to strengthening local food security through a collaborative approach involving the government, private sector, and community. The government's role as a facilitator and mediator is considered crucial in building coordination and trust among stakeholders. However, several challenges remain, including dependency on external food supplies, limited resources, regulatory barriers, and the sustainability of the program in the long term. Nevertheless, the program has shown initial impacts such as increased agricultural production and stabilization of local food prices. **Conclusion:** The GERMAS program plays a vital role in fostering cross-sector collaboration to enhance local food security. Strengthening government facilitation and local resource capacity is essential to ensure the program's sustainability.

Keywords: Collaborative Governance; Food Security; Planting Movement; Community Participation.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya alih fungsi lahan secara ekstrem, fluktuasi inflasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan di Kabupaten Aceh Singkil. Kondisi ini berdampak pada terganggunya ketahanan pangan lokal meskipun telah diluncurkan berbagai program pemerintah di sektor pertanian. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk kolaborasi dalam pelaksanaan program Gerakan Menanam Serentak (GERMAS) yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan petani, kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas pasokan pangan lokal. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena sesuai untuk menggali secara mendalam dinamika interaksi antar aktor dalam pelaksanaan program GERMAS. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan melibatkan aktor-aktor utama yang berperan langsung dalam program, seperti pejabat Dinas Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, kepala desa pelaksana GERMAS, kelompok tani, serta masyarakat penerima manfaat. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Ketahanan Pangan karena memiliki peran strategis dalam perencanaan dan koordinasi program. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Aceh Singkil pada rentang waktu Januari hingga Maret 2024 selama kurang lebih 3 bulan. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak NVivo dengan kerangka teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2007), yang mencakup empat dimensi utama: kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaborasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program GERMAS di Kabupaten Aceh Singkil telah berkontribusi positif terhadap penguatan ketahanan pangan lokal melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator dinilai krusial dalam membangun koordinasi dan kepercayaan antar aktor. Namun demikian, tantangan masih dihadapi, seperti ketergantungan pada pasokan pangan eksternal, keterbatasan sumber daya, hambatan regulasi, serta keberlanjutan program dalam jangka panjang. Meski demikian, program ini telah menunjukkan dampak awal berupa peningkatan produksi pertanian dan stabilisasi harga pangan lokal. **Kesimpulan:** Program GERMAS terbukti mampu mendorong kolaborasi lintas sektor dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan daerah. Optimalisasi peran pemerintah dan penguatan kapasitas sumber daya lokal perlu terus dilakukan untuk menjamin keberlanjutan program.

Kata kunci: *Collaborative Governance*; Ketahanan Pangan; Gerakan Menanam; Masyarakat.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perorangan secara berkelanjutan, yang ditandai dengan tersedianya pangan dalam jumlah dan mutu yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau (UU No. 18 Tahun 2012). Dalam konteks ini, aspek ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, dan keberlanjutan pangan menjadi pilar utama yang perlu dijaga. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk keempat terbanyak di dunia menghadapi tantangan signifikan dalam menjamin ketersediaan pangan. Menurut Badan Pusat Statistik (2022), peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan pangan nasional. Oleh karena itu, produksi pangan yang mencukupi dan merata menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh pemerintah, terutama di daerah-daerah dengan potensi agraris yang menurun. Dalam rentang waktu 2021–2023, data produksi pangan nasional menunjukkan dinamika yang mengkhawatirkan. Produksi beras mengalami peningkatan

sebesar 3,92%, namun peningkatan ketersediaan per kapita hanya 0,86% (Kementerian Pertanian RI, 2023). Di sisi lain, produksi jagung dan cabai mengalami penurunan signifikan, masing-masing sebesar 8,59% dan 32,17%, yang berdampak pada penurunan ketersediaan per kapita dan berpotensi mendorong inflasi sektor pangan. Khususnya di Provinsi Aceh, tren inflasi dari tahun 2014 hingga 2022 menunjukkan pola fluktuatif. Pada tahun 2022, inflasi mencapai 4,5%, yang menandakan adanya tekanan harga barang dan jasa, termasuk pangan (BPS Aceh, 2022). Tekanan inflasi ini berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan, sehingga memperburuk akses terhadap pangan yang layak dan bergizi. Hal ini semakin mempertegas urgensi peran pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan lokal.

Di Kabupaten Aceh Singkil, data BPS Aceh Singkil (2023) menunjukkan persoalan ketahanan pangan diperparah oleh penurunan signifikan luas lahan sawah dari 4.235 hektar pada 2012 menjadi hanya 1.087 hektar pada tahun 2023 (SK Menteri ATR/BPN No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019). Berkurangnya lahan pertanian menjadi indikator kritis dalam penurunan produksi pangan, terutama beras sebagai komoditas utama. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap ketergantungan pangan dari luar daerah, yang rentan terhadap gangguan pasokan dan fluktuasi harga. Sebagai upaya untuk mengatasi ancaman ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menggagas program Gerakan Menanam Serentak (GERMAS) yang diluncurkan oleh Pj. Bupati Drs. Azmi, M.AP bersama Dinas Pangan, Hortikultura, dan Peternakan. Program ini menargetkan peningkatan produksi lokal melalui budidaya komoditas unggulan seperti jagung, cabai, dan semangka, serta mendorong kemandirian pangan masyarakat melalui pelibatan aktif warga desa (BPS Aceh Singkil, 2022). Namun demikian, pelaksanaan program GERMAS menghadapi sejumlah tantangan, seperti terbatasnya cakupan wilayah pelaksanaan (hanya 35 dari 120 desa atau 29%), keterbatasan jenis komoditas, serta minimnya pendampingan teknis dan penyuluhan pertanian.

Dalam konteks tersebut, pendekatan *Collaborative Governance* menjadi sangat relevan. Model ini menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai aktor, baik dari pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi, dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan publik (Ansell & Gash, 2008). Penelitian oleh Sartika (2024) menunjukkan bahwa penerapan *Collaborative Governance* dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Bekasi mampu mendorong partisipasi multipihak dan meningkatkan akuntabilitas serta keberlanjutan program. Hal ini sejalan dengan temuan Indrayani et al. (2024) yang menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif mampu mempercepat proses transformasi di sektor industri kreatif melalui keterlibatan aktif dari aktor lokal, pelaku usaha, dan pemerintah daerah. Dengan demikian, penerapan *Collaborative Governance* dalam program GERMAS di Aceh Singkil diharapkan mampu membangun sinergi yang lebih kuat antarpihak, memperkuat kapasitas kelembagaan lokal, serta menciptakan ketahanan pangan yang inklusif dan berkelanjutan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian mengenai ketahanan pangan dan peran pemerintah dalam meningkatkan produksi pangan lokal telah banyak dilakukan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Berbagai studi menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat, inovasi pertanian, serta intervensi kebijakan untuk meningkatkan ketahanan pangan (Rachman & Ariani, 2002; Purwaningsih, 2008). Selain itu, model *Collaborative Governance* juga telah dibahas dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, pengentasan kemiskinan, dan perumusan kebijakan publik (Ansell & Gash, 2008). Namun, penerapan pendekatan *Collaborative Governance* dalam konteks ketahanan pangan lokal, khususnya pada program-program spesifik seperti Gerakan Menanam Serentak (GERMAS) di tingkat kabupaten, masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek produksi dan distribusi pangan secara makro atau pada kebijakan ketahanan pangan dari sudut pandang pemerintah pusat. Belum banyak kajian yang secara khusus menganalisis bagaimana kolaborasi antar aktor, termasuk pemerintah daerah, masyarakat desa, petani, sektor

swasta, dan akademisi, yang diimplementasikan dalam praktik nyata di tingkat lokal, khususnya dalam kerangka program GERMAS di Kabupaten Aceh Singkil.

Selain itu, hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara mendalam mengevaluasi efektivitas *Collaborative Governance* dalam program GERMAS, baik dari sisi koordinasi antar lembaga, partisipasi masyarakat, maupun keberlanjutan program. Padahal, pendekatan kolaboratif sangat penting untuk menyelesaikan kompleksitas permasalahan pangan yang tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan literatur sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan berbasis praktik lokal dalam penguatan ketahanan pangan melalui tata kelola kolaboratif.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan kajian ilmiah yang telah dilakukan oleh peneliti lain dan memiliki relevansi dengan topik yang sedang dikaji saat ini, khususnya dalam konteks *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan program ketahanan pangan dan gerakan menanam. Dalam konteks ini, penulis mengkaji berbagai penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dan pembanding, guna memperkaya kerangka konseptual dan mendalami posisi penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian pertama dilakukan oleh Sheila Aulia Savana (2022) dalam jurnal berjudul "Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesehatan Melalui Program GERTAK PELOR di Desa Sidoasri, Lampung Selatan". Penelitian ini menggambarkan bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program penanaman kelor dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Studi ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam keberhasilan program berbasis komunitas, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi. Penelitian kedua oleh Yustika Rahma (2021) dalam skripsi berjudul "Peran Pemerintah dalam Inovasi Gerakan Serentak Pemanfaatan Pekarangan Organik (GERTAK PETANI)" menyoroti bagaimana pemerintah daerah menginisiasi program pemanfaatan pekarangan sebagai upaya mendukung ketahanan pangan lokal. Fokus utamanya adalah pada inovasi kebijakan dan sinergi antara perangkat daerah dengan masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut di Kelurahan Lapajung, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, Mohammad Mulyadi (2016) dalam artikelnya yang berjudul "Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan dalam Masyarakat", membahas secara umum mengenai peran strategis pemerintah dalam menghadapi persoalan sosial melalui kebijakan yang proaktif dan terintegrasi. Walaupun tidak secara khusus membahas program pertanian atau ketahanan pangan, penelitian ini relevan karena menunjukkan bagaimana campur tangan pemerintah menjadi faktor penting dalam menyelesaikan persoalan struktural masyarakat.

Penelitian keempat oleh Rossi Prabowo (2010) berjudul "Kebijakan Pemerintah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia" membahas bagaimana kebijakan nasional diarahkan untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan secara menyeluruh. Fokus utamanya adalah pada dimensi ketersediaan, aksesibilitas, dan distribusi pangan, serta tantangan yang dihadapi negara berkembang seperti Indonesia dalam menjamin pangan bagi seluruh penduduk. Kelima, penelitian dari Lombok, A., Budiman, L., & Suhendi, D. (2024) dalam artikel "Resiliensi Penguatan Ketahanan Pangan Daerah di Indonesia," penulis menyoroti pentingnya ketahanan pangan di tengah variabilitas iklim dan ketidakstabilan ekonomi. Studi ini menekankan bahwa ketahanan pangan regional sangat bergantung pada stabilitas pertanian, ketersediaan sumber daya air, dan dukungan institusional. Temuan ini relevan dengan konteks *Collaborative Governance* dalam program ketahanan pangan lokal, seperti GERMAS di Aceh Singkil. Keenam, penelitian oleh Thahir, B. (2022) dalam artikel "Is There Any Collaborative Governance on Post-disaster Social Policy in Banten Province?," penulis membahas penerapan *Collaborative Governance* dalam kebijakan sosial pascabencana di Provinsi Banten. Studi ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat meningkatkan efektivitas kebijakan sosial, termasuk dalam konteks ketahanan pangan. Temuan ini mendukung pentingnya pendekatan

kolaboratif dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan di tingkat lokal. Terakhir, penelitian oleh Farah Fatika Sari (2022) berjudul "*Collaborative Governance in Kelompok Wanita Tani (KWT) Women's Empowerment Programs to Realize Food Security in Cilegon City*" membahas implementasi *Collaborative Governance* dalam program pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kota Cilegon. Penelitian ini menyoroiti bagaimana kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Hasilnya menunjukkan bahwa proses *Collaborative Governance* belum merata di seluruh KWT, dengan tantangan seperti kurangnya monitoring dan evaluasi, serta dukungan yang belum optimal dari pemerintah setempat.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang signifikan dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya, khususnya dalam konteks implementasi *Collaborative Governance* pada program ketahanan pangan berbasis gerakan menanam. Sebagian besar penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Savana (2022) dan Rahma (2021), berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan tanam bersama, namun lebih menekankan pada aspek partisipasi masyarakat atau inovasi kebijakan lokal tanpa menelaah secara mendalam pola kolaborasi antar aktor dalam kerangka *Collaborative Governance*. Sementara itu, penelitian Mulyadi (2016) dan Prabowo (2010) lebih luas cakupannya, mengangkat peran pemerintah dalam isu sosial dan kebijakan pangan secara makro, tanpa spesifik pada mekanisme kolaboratif dan kontekstualisasi lokal seperti yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Penelitian Sari (2022) memang telah mengangkat pendekatan *Collaborative Governance*, tetapi konteksnya terbatas pada pemberdayaan perempuan dalam kelompok tani di wilayah perkotaan (Kota Cilegon), serta belum mengulas secara komprehensif hambatan struktural dan koordinatif antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program kolaboratif tersebut.

Sebagai pembeda utama dan bentuk kebaruan ilmiah, penelitian ini secara spesifik mengkaji bagaimana *Collaborative Governance* dijalankan dalam penyelenggaraan Program Gerakan Menanam Serentak (GERMAS) di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, wilayah yang hingga kini belum banyak diteliti dalam konteks tersebut. Penelitian ini mengkaji secara mendalam struktur kolaborasi antar aktor (pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya), menganalisis peran, mekanisme koordinasi, dinamika kepentingan, serta hambatan yang muncul dalam pelaksanaan GERMAS, dengan menggunakan kerangka teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2008) sebagai landasan analisis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis dalam memperluas aplikasi *Collaborative Governance* dalam konteks lokal dan rural, tetapi juga kontribusi praktis bagi perumusan strategi kolaboratif yang lebih efektif dalam mendukung ketahanan pangan di daerah tertinggal dan pinggiran.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan program gerakan menanam serentak (GERMAS) di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam Program Gerakan Menanam Serentak (GERMAS) di Kabupaten Aceh Singkil. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami fenomena secara holistik dengan fokus pada konteks dan interaksi antar pemangku kepentingan tanpa memisahkan objek menjadi variabel yang terpisah. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak

terkait seperti pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, arsip, dan sumber pustaka lainnya yang mendukung keabsahan data. Informan dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Informan utama terdiri dari kepala dinas, pejabat kecamatan, perwakilan swasta, kepala desa, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Pemilihan ini bertujuan agar informasi yang diperoleh relevan dan mencerminkan realitas pelaksanaan program di lapangan. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, yang berperan aktif dalam proses pengumpulan dan interpretasi data. Untuk menunjang keakuratan data, digunakan pula instrumen tambahan seperti pedoman wawancara, alat tulis, buku catatan, serta perekam suara dan gambar.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur memberikan ruang fleksibel bagi peneliti dan informan untuk menggali informasi. Observasi dilakukan secara langsung dengan keterlibatan peneliti dalam kegiatan informan guna menangkap dinamika kolaborasi dan implementasi program. Dokumentasi meliputi pengumpulan dokumen-dokumen resmi, foto kegiatan, serta catatan lapangan yang relevan untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi. Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan bantuan perangkat lunak NVivo yang memfasilitasi pengelolaan data kualitatif secara sistematis dan efisien. Langkah-langkah analisis meliputi impor data, pengkodean (*coding*), pengorganisasian data ke dalam kategori atau tema (*nodes*), eksplorasi data melalui *query*, visualisasi temuan, dan penyusunan laporan akhir. Melalui pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk kolaborasi antar pihak dalam program GERMAS. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil sebagai lokasi utama pengumpulan data dan pelaksanaan program.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan program gerakan menanam serentak (GERMAS) di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Analisis ini menggunakan aplikasi perangkat lunak Nvivo 12 untuk menganalisis data. Penulis menggunakan teori *Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2007). Teori tersebut menjelaskan bahwa *Collaborative Governance* di nilai melalui beberapa dimensi, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Kondisi Awal

Pada tahap awal pelaksanaan Program GERMAS di Kabupaten Aceh Singkil, pemangku kepentingan memulai kolaborasi dengan kondisi yang beragam, sehingga perlu membangun kepercayaan, mengelola konflik, dan saling menghormati. Analisis menggunakan Nvivo 12 menunjukkan bahwa dimensi kondisi awal terdiri dari tiga indikator utama, yaitu kondisi sumber daya, insentif atau manfaat, dan riwayat krisis pangan, dengan insentif atau manfaat menjadi aspek yang paling banyak dibahas oleh informan.

Gambar 1. 1 Kegiatan Serah Terima Bibit Tanaman Cabai Poktan Sebagai Salah

Satu Bentuk Insentif Program Gernas



Sumber : Dokumentasi DTPHP (2024)

Insentif ini meliputi dukungan pertanian berupa bantuan benih, pupuk, pestisida, fasilitas alat mesin pertanian, serta subsidi biaya produksi yang didukung oleh perjanjian hibah resmi. Selain itu, program ini memberikan manfaat ekonomi dengan membuka peluang kerja bagi masyarakat pengangguran serta menambah penghasilan melalui hasil panen. Dari aspek sosial dan lingkungan, GERMAS membantu menstabilkan harga kebutuhan pokok dan mengurangi inflasi melalui peningkatan produksi pangan lokal.

Sumber daya yang tersedia juga cukup memadai, dengan 74 tenaga penyuluh pertanian yang kompeten di 11 kecamatan serta lahan pertanian yang luas, didukung oleh kebijakan pemerintah seperti program “1 hektar 1 desa.” Meskipun demikian, pelatihan dan adaptasi teknologi tetap diperlukan agar program dapat berjalan optimal. Riwayat krisis pangan di Aceh Singkil tidak signifikan, walaupun masih ada ketergantungan pada pasokan dari daerah lain. Oleh karena itu, peningkatan produksi lokal terus dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan. Program GERMAS dan dukungan pemerintah menjadi langkah strategis menuju kemandirian pangan di masa depan.

3.2. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan Program GERMAS di Kabupaten Aceh Singkil sangat penting dalam keberhasilan kolaborasi. Berdasarkan analisis menggunakan Nvivo 12, desain ini meliputi empat dimensi utama, yakni eksklusivitas forum, inklusivitas partisipatif, aturan dasar yang jelas, dan proses transparansi, dengan eksklusivitas forum sebagai aspek yang paling banyak dibahas oleh informan. Program ini bersifat terbuka dan inklusif, memungkinkan partisipasi luas dari berbagai pihak mulai individu, komunitas, hingga perusahaan, dengan kerja sama yang diatur melalui MOU agar berjalan transparan dan terstruktur.

Gambar 1. 2 Sistem *Open Data* Program Gernas

NO	TANAMAN	LETAK TANAMAN	LUJAS m ²	POKMAS	TANGGAL TANAM
1	JAGUNG	SINGKIL UTARA GOSONG TELAGA BARAT	AREA: 10000m ² TANAMAN: 10000m ²	KELOMPOK MASYARAKAT 32 (IASIDIN) IPANTI DAMSIR, SP	RENC. TANAM: 02/05/2 PRED. PANEN: 10/07/2
2	CABAI	SINGKIL PULAU SAROK	AREA: 2500m ² TANAMAN: 2500m ²	KELOMPOK MASYARAKAT 28 (SOGIMAN) HARTINI	RENC. TANAM: 29/03/2 PRED. PANEN: 02/07/2
3	CABAI	SIMPANG KANAN SIDODADI	AREA: 2500m ² TANAMAN: 2500m ²	POKTAN INGIN MAJU ERLINTA, SP	RENC. TANAM: 10/03/2 PRED. PANEN: 10/06/2
4	CABAI	SINGKOHOR MUKTI JAYA	AREA: 2500m ² TANAMAN: 2500m ²	KELOMPOK MASYARAKAT 29 (MARUDI) JIMAH FARIYANTI, SP	RENC. TANAM: 27/02/2 PRED. PANEN: 15/05/2
5	JAGUNG	PULAU BANYAK PULAU BALAI	AREA: 10000m ² TANAMAN: 10000m ²	KELOMPOK MASYARAKAT 34 (?) RAFLI, SP	RENC. TANAM: 19/02/2 PRED. PANEN: 22/06/2
6	JAGUNG	SIMPANG KANAN KAIN GOLONG	AREA: 10000m ² TANAMAN: 10000m ²	KELOMPOK MASYARAKAT 26 (ASMIRAN) ERLINTA, SP	RENC. TANAM: 06/02/2 PRED. PANEN: 15/05/2
7	JAGUNG	DANAU PARIS BISKANG	AREA: 10000m ² TANAMAN: 10000m ²	KELOMPOK MASYARAKAT 28 (KADIRUN) DERIES, SP	RENC. TANAM: 06/02/2 PRED. PANEN: 15/05/2
8	JAGUNG	PULAU BANYAK BARAT SUKA MAKMUR	AREA: 10000m ² TANAMAN: 10000m ²	KELOMPOK MASYARAKAT 33 (ALIMUDI GULO) DENI FURQAN, SP	RENC. TANAM: 27/01/2 PRED. PANEN: 05/05/2

Sumber : GERMAS (2023)

Selain itu, GERMAS melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah, sektor swasta, LSM, dan kelompok pemuda yang aktif dalam pengembangan lahan pertanian. Transparansi menjadi prinsip utama, dimana informasi program disebarluaskan melalui media konvensional dan digital agar masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mengakses data dengan mudah, meningkatkan partisipasi dan pengawasan publik.

Dasar pelaksanaan program ini didukung regulasi yang jelas, seperti Keputusan Bupati Nomor 188.45/402/2023 tentang pembentukan tim Germas, yang menjamin keteraturan dan keberlanjutan pelaksanaan. Kegiatan seremoni penanaman dan panen bersama juga digunakan sebagai strategi sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi masyarakat. Dengan desain kelembagaan yang inklusif, transparan, dan berlandaskan aturan kuat, Program GERMAS mampu berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi ketahanan pangan di Aceh Singkil.

3.3. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif dalam Program GERMAS di Kabupaten Aceh Singkil berperan penting dalam membangun kepercayaan, mediasi, dan pemberdayaan pihak terkait. Berdasarkan analisis menggunakan Nvivo 12, terdapat dua dimensi utama, yaitu mediasi dan pemberdayaan, di mana mediasi menjadi fokus utama pembahasan informan. Mediasi dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama Bupati dan jajarannya, untuk menjembatani komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan, termasuk pihak swasta. Pemerintah juga mengatur distribusi bantuan secara bertahap agar adil dan menghindari kesenjangan sosial, dengan strategi komunikasi yang transparan dan partisipatif.

Gambar 1. 3 Dokumen Daftar Penyuluh Program Germas

DAFTAR PENYULUH PERTANIAN PROVINSI ACEH KABUPATEN ACEH SINGKIL														
No.	Provinsi	Kab/Kota	Kecamatan	Penyuluh Pertanian			NIK	NP/No_Ujan_THL	LIP	Pendidikan Terakhir (SLTA/S2/ D4/S1/S2/ S3)	Status PNS/PTL/ Pusat/ THL	Tempat Tugas (Provinsi/ Kabupaten/ Kecamatan)	Wilayah Kerja	Ket
				Gelar Depan	Nama	Gelar Belakang								
1	Aceh	Aceh Singkil			Ernawati Koto	SP. M. Ikom	1110066309830001	198509232008032001	P	S2	PHS	Kabupaten	-Kecamatan Gunung Meriah -Kecamatan Pulau Banyak	Kf/ Penyuluh Kabupaten
2					Syamsir		1110040310710001	197110032007011004	L	SFP	PHS	Kabupaten	-Kecamatan Kuala Baru	Kf/ Penyuluh Kabupaten
3					Setha Darma		1110060105780004	197805012006041000	L	SMK	PHS	Kabupaten	-Kecamatan Kota Baharu	Kf/ Penyuluh Kabupaten
4					Sajen Pratiwi	S. TP	1110064802950001	199502082019032006	P	S-1	PHS	Kabupaten	-Kecamatan Simpang Kanan	Kf/ Penyuluh Kabupaten
5					Irwansyah	SP	1110060202830002	198302022017061001	L	S-1	PHS	Kabupaten	-Kecamatan Singkil Utara -Kecamatan Pulau Banyak	Kf/ Penyuluh Kabupaten
6					Irwansyahputra	SP	1110060704870001	198704072017061001	P	S-1	PHS	Kabupaten	-Kecamatan Saro -Kecamatan Danau Paris	Kf/ Penyuluh Kabupaten
7					Rosmansyah	SP	1110101102850001	19850212017061001	L	S-1	PHS	Kabupaten	-Kecamatan Singkil	Kf/ Penyuluh Kabupaten
8			Gunung Meriah		Halimah	SP	1110065511720001	197211152006042006	P	S-1	PHS	Kecamatan	-Desa Sanggeheru Silulusan -Desa Blok 15 -Desa Blok 18	PPU Koordinator BPP Gunung Meriah
9			Gunung Meriah		Syukriwadi	SP	1110062209650001	196509221994031005	L	S-1	PHS	Kecamatan	-Desa Siarjo-Anjo Meriah	PPL

Sumber : DTPHP Kabupaten Aceh Singkil (2024)

Pemberdayaan tercermin dalam pendampingan aktif penyuluh pertanian kepada petani, yang tidak hanya memberikan bimbingan teknis tetapi juga menyampaikan kendala ke pemerintah. Dukungan pimpinan daerah dan pemanfaatan dana desa memperkuat upaya ini, meski keterbatasan anggaran kabupaten. Selain bantuan material, program ini juga berupaya mengubah pola pikir masyarakat agar pertanian menjadi mata pencaharian berkelanjutan. Secara keseluruhan, kepemimpinan fasilitatif dalam GERMAS memadukan mediasi yang efektif dan pemberdayaan strategis guna mendukung keberhasilan program ketahanan pangan di Aceh Singkil.

3.4. Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi dalam Program GERMAS di Kabupaten Aceh Singkil melibatkan beberapa tahap krusial yang berjalan secara sinergis, yakni dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Dari semua

tahapan tersebut, hasil sementara menjadi fokus utama yang banyak dibahas oleh para informan karena menunjukkan perkembangan nyata dari pelaksanaan program. Program GERMAS berhasil meningkatkan produksi berbagai komoditas pertanian seperti padi, jagung, cabai, dan bawang merah yang sebelumnya kurang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, keterlibatan petani, termasuk generasi milenial, semakin meningkat, yang berkontribusi positif terhadap perekonomian masyarakat lokal. Walaupun demikian, tantangan seperti perubahan cuaca tetap menjadi kendala yang harus dihadapi dalam pelaksanaan program ini. Pemahaman bersama antar pemangku kepentingan menjadi fondasi penting dalam kolaborasi. Kesamaan visi untuk menjaga ketahanan pangan dan mencegah inflasi akibat kekurangan pasokan pangan menjadi motivasi utama semua pihak terlibat. Pada awalnya, terdapat resistensi dari masyarakat yang disebabkan oleh kecurigaan terhadap tujuan program. Namun, pendekatan transparan dan inklusif yang diterapkan oleh pemerintah dan mitra berhasil mengatasi keraguan tersebut sehingga pemahaman dan dukungan kolektif dapat terbangun. Kesadaran bahwa pangan adalah kebutuhan bersama, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu, mendorong partisipasi aktif dan tanggung jawab kolektif dalam mendukung keberlangsungan program.

Komitmen terhadap proses menjadi faktor kunci keberhasilan kolaborasi ini. Dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta tetap kuat meskipun menghadapi berbagai tantangan di lapangan, seperti cuaca dan keterbatasan sumber daya. Partisipasi masyarakat tetap terjaga dengan mekanisme yang adil, seperti sistem bagi hasil yang menyeimbangkan kepentingan pemerintah dan petani. Keterlibatan ini bukan hanya karena kebijakan, tetapi juga karena program ini menyentuh langsung mata pencaharian petani. Intensitas koordinasi dan diskusi rutin antar pihak memperkuat komitmen untuk terus melanjutkan dan menyempurnakan pelaksanaan program. Membangun kepercayaan menjadi elemen utama dalam menjaga kesinambungan program. Pemerintah daerah berupaya menjalin kepercayaan melalui keterbukaan dalam pelaporan kegiatan dan penggunaan anggaran, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap program, mulai dari *launching* hingga panen.

Gambar 1. 4 Laporan Gerakan Menanam Aceh Singkil Tahun 2024

LAPORAN GERAKAN MENANAM ACEH SINGKIL (GERMAS) TAHUN 2024											
No	Kecamatan	Alamat / Titik Kordinat		Kelompok Masyarakat/Jumlah KK (Kelompok Tani)	Penyuluh	Jenis Tanaman	Nama Tanaman	Tanggal Tanam	Tanggal Tanam (Rencana)	Tanggal Panen (Prediksi)	Luas Tanam (Ha)
1	Suro Baru	Mandumpang	2,46733,98,03688,3,2m	1	Samhari	Pangan	Jagung	23 Januari 2024			1
2	Pulau Banyak	Pulau Balai	2°18'42",97°24'51",6,2m	1	Rafli	Pangan	Jagung				1
3	Pulau Banyak Barat	Suka Makmur	2,18908,97,29132,-24,1m	1	Deni	Pangan	Jagung	27 Januari 2024			1
4	Simpang Kanan	Kain Golong	2°25'32,7N 97°59'23,25"E	1	Erlinta, SP	Pangan	Jagung	06 Februari 2024		15 Mei 2024	1
5	Kuala Baru	Suka Jaya	2,36408,97,69642,-53,2ft	1	Sahminan	Semangka	Semangka	16 Januari 2024		30 Maret 2024	1
6	Danau Paris	Biskang	2°19'41",98°6'21",31,2m,87"	1	Sarjito	Pangan	Jagung	06 Februari 2024		15 Mei 2024	1
7	Singkil Utara	Gosong Telaga Barat		1	Titin Suryani, SP	Pangan	Jagung				1
8	Singkil	Pulo Sarok	2,27544,97,81136-18,2m	1	Hartini	Hortikultura	Cabe		29 Maret 2024		0,25
9	Singkohor	Mukti Jaya	2°33'33,198N 97°57'3,15"E	1	Pujianto	Hortikultura	Cabe	27 Februari 2024		15 Mei 2024	0,25
10	Gunung Meriah	Lae Butar	2,382548°97,958648	1	Leli Niasti,SP	Pangan	Jagung	22 Desember 2023			1
11	Kuta Baharu	Mukti Lincir	2°54'75°73",97°8'57",36,5m	1	Rini Rahayu, S. SP	Pangan	Jagung	23 Januari 2024		25 April 2024	1

Sumber : DTPHP Kabupaten Aceh Singkil (2024)

Transparansi seperti pelaporan pelaksanaan program ini memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan memastikan bahwa dana serta sumber daya digunakan sesuai dengan tujuan. Integritas individu yang terlibat juga menjadi penopang utama dalam menjaga kepercayaan ini agar hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta tetap harmonis dan kolaboratif. Dialog tatap muka menjadi sarana utama dalam menjaga komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Melalui rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan

pihak swasta, berbagai kendala dapat didiskusikan secara terbuka dan solusi bersama dapat dirumuskan. Selain itu, sosialisasi yang rutin dilakukan memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat tentang tujuan dan manfaat program sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif. Komunikasi yang saling menguntungkan dengan sektor swasta juga terjalin, dimana pihak swasta memberikan dukungan meski tidak selalu dalam jumlah penuh. Secara keseluruhan, mekanisme dialog yang berjalan efektif ini menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program GERMAS di Kabupaten Aceh Singkil, meskipun tantangan tetap ada dan terus dihadapi bersama.

3.5. Diskusi Temuan Utama

Temuan utama dari penelitian ini menyoroti pentingnya dimensi proses kolaborasi dalam pelaksanaan *Collaborative Governance*, khususnya dalam konteks Program Gerakan Menanam Serentak (GERMAS) di Kabupaten Aceh Singkil. Kolaborasi antarpihak yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kekuatan utama yang mendorong keberhasilan program ini. Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori Ansell & Gash (2007), terdapat lima aspek kunci dalam proses kolaborasi yang saling mendukung: hasil sementara (*early wins*), pemahaman bersama (*shared understanding*), komitmen terhadap proses (*commitment to the process*), membangun kepercayaan (*trust-building*), dan dialog tatap muka (*face-to-face dialogue*). Dimensi hasil sementara menjadi indikator paling menonjol karena menunjukkan dampak nyata, seperti peningkatan produksi pangan lokal, keterlibatan petani milenial, dan kontribusi terhadap stabilitas ekonomi daerah. Hal ini sejalan dengan temuan Farah Fatika Sari (2022) yang menunjukkan bahwa program ketahanan pangan berbasis Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kota Cilegon juga menghasilkan dampak awal positif dalam pemanfaatan lahan pekarangan. Namun, penelitian ini lebih menekankan pada keberhasilan “hasil awal” sebagai pemicu motivasi kolektif, sedangkan penelitian Sari menyoroti tantangan yang muncul akibat kurangnya evaluasi dan dukungan dari pemerintah. Aspek pemahaman bersama dalam penelitian ini memperkuat gagasan Emerson et al. (2012) tentang pentingnya *collaborative capacity*. Dalam kasus Aceh Singkil, pemahaman bahwa pangan adalah kebutuhan kolektif memunculkan kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif, berbeda dengan hasil studi Mohammad Mulyadi (2016) yang lebih fokus pada dominasi peran negara dalam mengatasi persoalan sosial. Penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih partisipatif dibandingkan pendekatan *top-down*.

Komitmen terhadap proses juga menjadi dimensi penting yang muncul kuat dalam program GERMAS. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian Yustika Rahma (2021) tentang GERTAK PETANI, yang juga menunjukkan adanya keterlibatan aktif pemerintah daerah dan masyarakat. Namun, penelitian Rahma lebih banyak menyoroti aspek inovasi kebijakan dan sinergi teknis, sedangkan penelitian ini menekankan konsistensi para pihak dalam menjalankan kolaborasi meski menghadapi keterbatasan sumber daya. Dalam dimensi membangun kepercayaan, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik transparansi, keterbukaan informasi, dan pelibatan masyarakat menjadi fondasi utama dalam kolaborasi lintas sektor. Hal ini senada dengan temuan Thahir (2022) yang meneliti kolaborasi dalam kebijakan sosial pascabencana di Banten. Kedua penelitian sama-sama menekankan pentingnya *trust* dalam keberhasilan kebijakan kolaboratif, meskipun konteksnya berbeda. Yang menarik, di Aceh Singkil, kepercayaan dibangun tidak hanya melalui komunikasi formal, tetapi juga melalui keterlibatan langsung masyarakat dalam pengawasan kegiatan. Terakhir, aspek dialog tatap muka dalam Program GERMAS terbukti menjadi kunci dalam menjaga dinamika kolaborasi. Rapat koordinasi dan sosialisasi lintas sektor menjadi ruang partisipatif yang efektif. Ini menguatkan temuan Sheila Aulia Savana (2022) yang menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam keberhasilan program kesehatan berbasis tanaman lokal (kelor). Bedanya, Savana lebih menekankan aspek pemberdayaan individu, sementara penelitian ini berfokus pada sinergi antar lembaga dan pemangku kepentingan.

Jika dibandingkan dengan studi oleh Lombok et al. (2024) yang menekankan pentingnya

dukungan kelembagaan dan stabilitas sumber daya, maka penelitian ini memberikan tambahan wawasan tentang bagaimana interaksi kolaboratif dapat memperkuat kelembagaan itu sendiri dari bawah (*bottom-up*) melalui partisipasi aktif masyarakat. GERMAS tidak hanya menjadi program teknis, tetapi juga menjadi arena pembelajaran sosial dan penguatan tata kelola kolaboratif. Dengan demikian, secara keseluruhan, temuan penelitian ini tidak hanya memperkuat teori *Collaborative Governance* dari Ansell & Gash (2007), tetapi juga menunjukkan bahwa implementasinya dalam konteks ketahanan pangan memerlukan adaptasi lokal yang berbasis pada budaya partisipatif, kejelasan peran, dan keberlanjutan proses. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan *governance* berbasis komunitas, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi daerah lain yang ingin membangun ketahanan pangan melalui pendekatan kolaboratif.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan Program Gerakan Menanam Serentak (GERMAS) di Kabupaten Aceh Singkil, dapat disimpulkan GERMAS berhasil membangun kolaborasi lintas sektor yang berkontribusi positif terhadap penguatan ketahanan pangan lokal. Keberhasilan ini tercermin dari efektivitas kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan yang inklusif, serta proses kolaborasi yang didukung oleh komunikasi dan koordinasi yang baik. Namun demikian, partisipasi masyarakat masih bersifat pragmatis dan bergantung pada insentif ekonomi, sementara pemahaman terhadap manfaat jangka panjang masih terbatas. Selain itu, kondisi awal yang belum optimal menunjukkan perlunya peningkatan akses terhadap sumber daya serta pembinaan yang lebih terstruktur. Hasil kolaborasi juga telah mendorong peningkatan produksi pertanian dan pengendalian inflasi, namun tantangan dalam hal pemerataan dan keberlanjutan program tetap perlu diselesaikan melalui langkah-langkah strategis dan sistematis.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini hanya mengandalkan data dari informan yang terlibat langsung dalam Program GERMAS, sehingga berpotensi bias. Lokasi terbatas di Kabupaten Aceh Singkil, sehingga hasil belum tentu dapat digeneralisasi, ditambah dengan keterbatasan waktu yang membatasi kedalaman data.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa temuan dalam penelitian ini masih bersifat awal dan terbatas pada konteks lokal. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan penelitian lanjutan pada wilayah atau kabupaten lain untuk melihat dinamika kolaborasi dalam pelaksanaan program GERMAS, khususnya yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan. Penelitian mendatang juga dapat mengeksplorasi lebih dalam efektivitas mekanisme kolaborasi serta dampaknya terhadap hasil pembangunan secara berkelanjutan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Aceh Singkil beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Indonesia 2022*. Jakarta: BPS. Diakses dari

- <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/02/25/0a2afea4fab72a5d052cb315/statistik-indonesia-2022.html>
- BPS Aceh Singkil. (2022). Pertumbuhan Ekonomi Aceh. Badan Pusat Statistik
- BPS Aceh Singkil. (2023). Analisa Luas Lahan. <https://data.acehprov.go.id/dataset/luas-lahan-menurut-penggunaan/resource/062b26a2-c74e-4276-b37c-a5d3b6796571>
- BPS Aceh. (2022). “Analisa Tingkat Inflasi Aceh”. <https://data.acehprov.go.id/id/dataset/tingkat-inflasi-tahun-ke-tahun/resource/317dc526-8581-4969-b655-0d0c0cdbf1d6>.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). The design and implementation of Cross-Sector collaborations: Propositions from the literature. *Public Administration Review*, 66(s1), 44–55. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00665.x>
- DTPHP Kabupaten Aceh Singkil (2024). “Dokumen Daftar Penyuluh Program Germas”. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Aceh Singkil.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- GERMAS. (2023). Program Pemerintah Daerah Aceh Singkil. Retrieved from <https://germas.kominfoasingkil.net/>
- Indrayani, E., Murdiyana, Guntoro, D., Nurnawati, E., & Nainggolan, R. R. E. (2024). Transforming creative industries: A collaborative governance approach for digitalization in West Java. *SPECTRUM Journal of Social Sciences*, 1(4), 137–144. <https://doi.org/10.61552/sjss.2024.04.004>
- Kementerian Pertanian RI. Statistik Konsumsi pangan Indonesia. https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Statistik_Penunjang_Data_Ekonomi_Pertanian-2023-ttd.pdf.
- Lombok, A., Budiman, L., & Suhendi, D. (2024). Resiliensi penguatan ketahanan pangan daerah di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 13(1), 45–58. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jpa/article/view/5113>
- Mulyadi, M. (2016). Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan dalam Masyarakat. *Jurnal Kajian*, 21(3), 221–236.
- Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. (2023). Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/402/2023 tentang Pembentukan Tim Gerakan Menanam Aceh Singkil di Kabupaten Aceh Singkil. Aceh Singkil: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- Prabowo, R. (2010). Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia. *Mediagro*, 62(2), 62–73.
- Purwaningsih, Y. (2008). Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 9(1), 1–26. <https://doi.org/10.23917/jep.v9i1.1028>
- Rachman, H., & Ariani, W. (2002). Ketahanan Pangan: Konsep, Pengukuran dan Strategi. *FAE*, 20(1), 12–24.
- Rahma, Y., Khaerah, N., & Akbar, M. R. (2021). Peran Pemerintah Dalam Inovasi Gerakan Serentak Pemanfaatan Pekarangan Organik (Gertak Petani) Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Kelurahan Lapajung Kabupaten Soppeng. *Kybernology : Journal Of Government Studies*, 1(1), 65–76.
- Sari, F. F. (2022). Collaborative Governance in Kelompok Wanita Tani (KWT) Women's Empowerment Programs to Realize Food Security in Cilegon City. *International Journal of Social Sciences Review*, 3(1), 34–48. <https://doi.org/10.57266/ijssr.v3i1.82>
- Sartika, I. (2024). Collaborative Governance Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 16(2), 209–233. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v16i2.4864>
- Savana, S. A. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesehatan Melalui

Program Gerakan Serentak Penanaman Kelor (Gertak Pelor) Di Desa Sidoasri Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Thahir, B. (2022). Is there any Collaborative Governance on post-disaster social policy in Banten Province?. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 101–113.
<https://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/858/>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

